

BAB II

***HUMAN RIGHTS WATCH* SEBAGAI PENEGAK HAK ASASI MANUSIA**

Human Rights Watch (HRW) merupakan *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang memiliki fokus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia. HRW mempunyai markas besar di kota New York, Amerika Serikat dan memiliki kantor di berbagai kota dari berbagai negara yaitu; Amesterdam, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington D.C., dan Zurich.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak HAM, HRW berupaya untuk meningkatkan martabat manusia dari adanya pelanggaran HAM. HRW berkeyakinan bahwa semakin banyak penyalahgunaan HAM yang dapat dibawa ke pengadilan internasional akan membantu menyelesaikan persoalan HAM. Dalam tugasnya HRW memiliki tujuan yaitu sebagai organisasi yang melindungi HAM di seluruh dunia, dengan mengedepankan serta mendedikasikan pada upaya penerapan *Responsibility to Protect* di sejumlah negara-negara mereka beroperasi (Ula, 2017).

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang harus dinikmati oleh semua orang tanpa memandang kelas sosial, agama, etnis dan segala macam perbedaan. Sebagaimana yang diketahui bahwa HRW juga merupakan lembaga advokasi internasional yang mendukung HAM, sehingga HRW mengupayakan adanya jaringan internasional untuk merealisasikan tujuannya.

HRW merupakan INGO yang independen dengan tidak menerima dana dari pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. Independen HRW didukung oleh adanya kontribusi dari individu dan yayasan swasta di seluruh dunia.

Tantangan HRW dalam menegakkan HAM cukup berat dalam pelaksanaannya dimana pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh suatu rezim maupun individu yang memiliki kekuasaan tinggi. HRW membela hak-hak orang di seluruh dunia. HRW menyelidiki pelanggaran, mengungkapkan fakta secara luas, dan menekan mereka yang memiliki kekuatan untuk menghormati hak dan menjamin keadilan. Dalam bab II penulis akan menjabarkan HRW sebagai penegak HAM yang didalamnya termasuk sejarah berdirinya HRW, bagaimana landasan kerja di HRW, termasuk misi dan nilai apa yang dibawa oleh HRW, sistem kerja HRW serta bagaimana HRW sebagai menjadi pergerakan HAM internasional.

A. Gambaran Umum HRW

1. Sejarah Berdirinya HRW

Organisasi HRW diciptakan pada akhir 1970-an yaitu pada saat berkembangnya perhatian publik terutama di Amerika Serikat yang menyebabkan HAM menjadi perhatian internasional. Faktor-faktor yang mendukung terciptanya HRW mencakup pergeseran politik radikal di Amerika Serikat pada tahun 1981 yaitu dari administrasi carter yang mendukung HAM terhadap pemerintahan Reagan yang pada awalnya meremehkannya, meningkatnya kebutuhan untuk menghadapi pelanggaran hukum perang dalam konteks perang Amerika Tengah tahun 1980an, dan perkembangan organisasi yang memasuki pertarungan politik dengan pejabat pemerintahan Reagan dan orang Amerika digambarkan sebagai penyebab dari pelanggaran itu (Neier, 2012).

HRW merupakan hasil dari perubahan Helsinki Watch yang didirikan pada tahun 1978. *Helsinki Watch* dirancang untuk mendukung kelompok warga yang dibentuk di seluruh blok Soviet untuk memantau kepatuhan pemerintah terhadap Kesepakatan Helsinki 1975. *Helsinki Watch* mengadopsi sebuah metodologi yaitu "menamai dan mempermalukan" yang digunakan untuk mengumumkan secara publik pemerintah yang kasar melalui liputan media dan melalui pertukaran langsung dengan para pembuat kebijakan. Dengan memperhatikan pandangan internasional mengenai pelanggaran HAM di Uni Soviet dan Eropa Timur, *Helsinki Watch* berkontribusi pada transformasi demokratis yang dramatis pada akhir 1980an.

Selain itu, didirikannya HRW dipengaruhi juga oleh beberapa pemerhati HAM diantaranya adalah *Americas Watch*. *Americas Watch* didirikan pada tahun 1981 ketika terjadi perang saudara berdarah yang menimpa Amerika Tengah. Mengandalkan penemuan fakta secara ekstensif, *Americas Watch* tidak hanya menangani pelanggaran oleh pasukan pemerintah, namun menerapkan hukum humaniter internasional untuk menyelidiki dan mengekspos kejahatan perang oleh kelompok pemberontak.

Selain meningkatkan kekhawatirannya di negara-negara yang terkena dampak, *Americas Watch* juga secara kritis memeriksa peran yang dimainkan oleh pemerintah asing, khususnya Amerika Serikat, dalam memberikan dukungan militer dan politik kepada rezim-rezim yang kasar. Dalam suksesi yang cepat di tahun 1980an, *Asia Watch* (1985), *Africa Watch* (1988), dan *Middle East Watch* (1989) dikenal sebagai "*The Watch Committees*." Pada tahun 1988, organisasi

tersebut secara resmi mengadopsi nama *all-inclusive Human Rights Watch*.

Tantangan baru HAM di tahun 1990an membawa inovasi yang penting dalam karya HRW. Pelaporannya pada Perang Teluk Persia 1991 untuk pertama kalinya ditujukan untuk pelanggaran undang-undang perang dalam kampanye pengeboman. Target advokasi diperluas untuk memberi perhatian lebih besar kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan regional seperti Uni Eropa. Pembersihan etnis dan genosida di Rwanda dan Balkan mendorong perlunya pelaporan kejahatan secara *real-time* dan dokumentasi kasus secara mendalam untuk mendesak penuntutan internasional untuk pertama kalinya pada 1990-an.

HRW telah mendukung dan mengkritik pengadilan internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, mengupayakan penuntutan pemimpin yang kasar termasuk Augusto Pinochet dari Chile dan Hissene Habre dari Chad, serta memainkan peran penting dalam penyusunan Statuta Roma sebagai dasar di dirikannya *International Criminal Court* (ICC).

HRW memperluas dan memperkuat tujuannya untuk menangani persoalan hak-hak perempuan, anak-anak, pengungsi, dan pekerja migran, serta membawa perspektif HAM kedalam isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, pemerkosaan sebagai kejahatan perang, dan tentara anak-anak. Organisasi tersebut menemukan cara baru untuk menyelidiki pelanggaran HAM dalam masyarakat tertutup seperti Arab Saudi dan Korea Utara. HRW juga melakukan pemeriksaan terhadap perdagangan senjata dan bisnis internasional yang

menyangkut HAM. Dengan mengkaji persoalan bisnis internasional, HRW menemukan adanya pelanggaran hak-hak dalam industri yaitu seperti dalam industri minyak, emas, dan pengemasan daging yang banyak memperkejakan pekerja ilegal.

Pada tahun 1997, HRW menerima Hadiah Nobel Perdamaian sebagai anggota pendiri Kampanye Internasional untuk Melarang Ranjau Darat, dan memainkan peran utama dalam perjanjian tahun 2008 yang melarang munisi tandan. Pada abad ke-21 telah membawa tantangan baru bagi HRW, yaitu pada serangan 11 September 2001 dan akibatnya perlu menyoroti bentuk tekanan baru pada kelompok teroris dan pendukung mereka dan pemantauan ketat undang-undang, kebijakan, dan praktik kontraterorisme yang melanggar HAM. Selain itu pandemi HIV / AIDS menyebabkan terciptanya program HRW yang ditujukan untuk HAM dan kesehatan.

HRW semakin menerapkan metodologi penelitiannya terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya khususnya di bidang pendidikan dan perumahan. HRW juga mulai menggunakan penelitian statistik, fotografi satelit, dan analisis data bom sebagai metodologi baru. Menggabungkan penemuan fakta di lapangan dengan teknologi baru dan advokasi inovatif, membuat HRW secara aktif mempromosikan penghormatan terhadap HAM di seluruh dunia (Human Rights Watch, 2017).



HRW.org

Gambar 2. 1Lambang Human Rights Watch
Sumber: (Human Rights Watch, 2017)

2. **Landasan Kerja HRW (Misi HRW dan Nilai Dasar HRW**

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi pemerhati HAM, HRW memiliki misi yaitu membela hak-hak manusia diseluruh dunia. HRW secara teliti melakukan investigasi terhadap terjadinya penyalahgunaan HAM, membuka fakta secara luas, dan menekan para pemilik kekuasaan untuk menghormati HAM serta menjamin keadilan. HRW adalah organisasi yang independen dan merupakan organisasi internasional yang bekerja sebagai bagian dari pergerakan yang memiliki semangat tinggi untuk menegakkan martabat manusia dan memajukan HAM bagi seluruh manusia.

Misi tersebut merupakan acuan bagi HRW untuk berani melindungi martabat dan HAM di seluruh dunia. Fokus perhatian HRW adalah agar

masyarakat diseluruh dunia dapat saling menghormati HAM dan menaati hukum yang telah disepakati baik hukum nasional maupun internasional. HRW menekankan bahwa segala bentuk kejahatan untuk didasari oleh yuridiksi agar tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi. Pelanggaran HAM terjadi dikarenakan pelaku tidak mengacu dan tidak berdasarkan pada hukum dalam tindakannya. Penyalahgunaan hukum juga seringkali menjadi penyebab pelanggaran terhadap HAM yang didasari oleh kepemilikan kekuasaan.

HRW memiliki nilai-nilai yang dijunjung bersama sebagai acuan dalam merealisasikan misinya, yaitu :

- a. Berkomitmen terhadap Misi
HRW berkomitmen untuk melindungi HAM diseluruh dunia dengan dipandu oleh hukum HAM dan hukum humaniter internasional serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
- b. Independen
HRW merupakan organisasi yang tidak menerima dana dari pemerintah dalam menjalankan perannya baik secara langsung atau tidak langsung. HRW juga tidak menerima dana dari pribadi manapun yang dapat membahayakan objektivitas dan independensi HRW. HRW tidak bersifat politis dan partisan karena untuk menjaga netralitas dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, HRW sangat menjaga nilai independensinya
- c. Faktual, Akurat dan Ber-Etika dalam Pencarian Fakta

HRW berkomitmen untuk mempertahankan standar akurasi dan keadilan yang tinggi. Dalam mencari berbagai perspektif untuk mengembangkan pemahaman analitik yang mendalam dan mendalami peristiwa, HRW sangat memperhatikan fakta dan akurasinya. Proses pencarian fakta seringkali berhadapan dengan korban dan saksi, untuk itu HRW bertanggungjawab dalam perilaku dan keamanan terhadap korban dan saksi.

d. Aktif Berfokus pada Dampak

HRW menjelaskan bahwa perannya dinyatakan berhasil bila tindakan yang telah dilakukan mengarah pada perubahan positif dan berkelanjutan. HRW berkomitmen untuk mengerjakan situasi sulit, di mana perhatian jangka panjang diperlukan untuk dampak yang berarti.

e. Mendukung Berbagai Gerakan HAM Internasional dan Kerjasama yang Saling Menguntungkan

HRW bekerja sama dengan berbagai aktor masyarakat sipil lokal dan internasional untuk memaksimalkan tujuan HRW. HRW menyatakan bahwa pihaknya menentang serangan terhadap masyarakat sipil dan mempertahankan ruang politik di mana gerakan HAM yang lebih luas dapat beroperasi (Human Rights Watch, 2017).

Misi dan nilai HRW yang telah dipaparkan diatas menjadi landasan bagi HRW dalam menjalankan perannya. Dengan misi dan nilai yang menjadi dasar pelaksanaan membuat suatu organisasi dapat berkomitmen untuk mencapai tujuannya yaitu dalam hal ini menjaga dan melindungi martabat dan HAM. Dilihat dari misi

dan nilai yang dipegang oleh HRW, telah jelas bahwa HRW adalah organisasi pemerhati HAM yang melindungi HAM diseluruh dunia dimana terjadi adanya pelanggaran HAM.

B. Sistem Kerja HRW

Sebagai suatu organisasi, HRW tentunya memiliki suatu sistem kerja yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan misinya. Sebelum membahas bagaimana sistem kerja HRW dalam mencapai tujuannya, terlebih dahulu menjelaskan siapa pemimpin HRW dan staf ahli yang ada di dalamnya. Staf ahli inilah yang akan melakukan langkah advokasi dan investigasi terhadap suatu peristiwa yang dinilai terjadi adanya pelanggaran terhadap HAM.

Kepemimpinan HRW dikepalai oleh Kenneth Roth yang merupakan direktur eksekutif HRW. Sebelum bergabung dengan HRW pada tahun 1987, Roth bertugas sebagai jaksa federal di New York dan melakukan investigasi Iran-Contra di Washington, DC. Kenneth Roth merupakan lulusan Yale Law School dan Brown University. Roth telah melakukan banyak investigasi dan misi HAM di seluruh dunia. Dia telah banyak menulis tentang berbagai pelanggaran HAM, dengan memberikan perhatian khusus pada masalah keadilan internasional, kontraterorisme, kebijakan luar negeri dari kekuatan utama, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kemudian mengenai Staf ahli HRW, pada tahun 2013, HRW mempekerjakan sekitar 400 staf yang mencakup spesialis, pengacara, jurnalis, pendukung, dan akademisi dari berbagai latar belakang dan kebangsaan. Para ahli ini melakukan misi pencarian fakta dan menyelidiki pelanggaran HAM yang secara imparial melaporkan kondisi HAM di sekitar 90 negara. Fakta yang telah ditemukan oleh para staf kemudian digunakan dalam advokasi yang ditargetkan untuk mempromosikan HAM dan keadilan di seluruh dunia.

Pekerjaan HRW dipandu oleh manajemen senior, staf, dewan direksi, dewan pimpinan dan komite penasihat.

Membahas mengenai Komite Penasihat HRW, yaitu komite yang dirancang untuk menyediakan divisi program di HRW dengan memberikan saran substantif dan nasehat kebijakan. Komite ini juga digunakan untuk memperdalam keterlibatan anggota komunitas HRW dalam program kerja organisasi. Komite Penasihat telah memainkan peran penting dalam merekrut anggota staf dan mengikat HRW terhadap aktivisme dan komunitas akademis yang lebih luas yang peduli dengan HAM. Seiring dengan keterlibatannya HRW dalam advokasi multi-polar dan mengambil isu-isu hak yang lebih rumit, staf program HRW mengandalkan saran dari pakar kebijakan dan mitra LSM, baik global maupun lokal. Komite Penasihat membantu dalam mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan isu-isu HAM yang sedang berkembang.

Selain itu, hal yang paling penting harus diperhatikan adalah Komite Penasihat memastikan bahwa HRW harus berpikir secara analitis dan progresif tentang tren politik dan ekonomi. Anggota Komite Penasihat mempertajam advokasi HRW dan menghubungkan HRW dengan para pembuat keputusan utama, wartawan, pejabat pemerintah, dan aktivis HAM. Pada akhirnya, Komite Penasihat menyebarkan laporan dan pernyataan dari para peneliti ke media dan outlet lain yang relevan, seperti konferensi dan universitas. Komite Penasihat HRW terdiri dari orang-orang yang memiliki pengalaman mendalam dan luas dalam urusan politik, ekonomi, dan sosial, secara umum, dan juga HAM yang lebih spesifik. Anggota komite biasanya mewakili bidang hukum, jurnalistik, aktivis sosial, kesehatan masyarakat, akademisi, atau profesi lainnya yang terkait dengan HAM.

HRW memiliki berbagai divisi di dalamnya yang membantu menjalankan perannya secara menyeluruh ke berbagai negara dan berbagai bidang yang terkait dengan persoalan HAM yaitu, *student task force; Africa Division; Americas Division; Asia Division; Europe and Central Asia*

Division; Middle East and North Arica Division; Childrens Rights Division; Disability Rights Division; Health and Human Rights Division; Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights Program; and Womens Rights Division. Divisi-divisi tersebut yang akan membantu dalam sistem kerja HRW.

Terkait dengan sistem kerja HRW, dalam menjalankan perannya sebagai penegak HAM, HRW melakukan investigasi yang kemudian hasilnya akan digunakan untuk melakukan advokasi terhadap suatu kebijakan atau perubahan. Peneliti HRW di lapangan terus memantau kondisi HAM di sekitar 80 negara di seluruh dunia. Para peneliti ini menciptakan fondasi kerja dengan melakukan komunikasi dengan orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan wewenang atau yang menyaksikannya. HRW juga berkoordinasi dengan para advokat, jurnalis, ahli negara, dan pejabat pemerintah setempat. Hasil dari penelitian nantinya akan dipublikasikan di lebih dari 100 laporan dan ratusan siaran pers setiap tahunnya.

Dalam proses investigasinya, HRW melakukan investigasi secara sistematis terhadap pelanggaran HAM di seluruh dunia. HRW secara aktif meneliti, melaporkan, dan mendorong adanya perubahan di lebih dari 90 negara. Dalam memilih negara yang menjadi fokus persoalan yang dihadapi, HRW memilih berdasarkan pada perkiraan negara mana yang memerlukan perhatian terlebih dahulu dan dimana dimungkinkan dapat melakukan perubahan. HRW menanggapi keadaan darurat namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan advokasi pada kasus-kasus terkait HAM yang telah mengakar, lama, dan terus memburuk.

Para peneliti bekerja pada metodologi yang mapan, terbukti, dan konsisten berdasarkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber dengan penelitian berbasis lapangan pada intinya. Beberapa peneliti HRW secara permanen berada di lapangan yaitu berada di dalam atau dekat dengan lokasi yang mereka fokuskan dan berada di tempat yang beragam seperti Bujumbura, Kairo, Bangkok, dan Tashkent. Peneliti lainnya bekerja di kantor utama yang terletak di New York,

Berlin, Brussels, London, Johannesburg, Moskow atau Washington DC.

Semua staf secara teratur melakukan misi untuk melakukan investigasi lapangan, mewawancarai korban dan saksi untuk mendapatkan fakta yang nantinya dapat dilaporkan dan diadvokasi. Para peneliti bekerja sama dengan aktivis, pengacara, wartawan masyarakat sipil setempat, dan mereka mencari kontak dengan pejabat negara dan pemerintah. Para peneliti mengikuti perkembangan yang relevan dengan pekerjaan mereka melalui media, laporan dari organisasi yang sejenis, komunitas riset, dan komunikasi melalui telepon dan email dengan narasumber yang tepercaya dari komunitas aktivis lokal.

Selain menerbitkan laporan, HRW memperluas upaya lobi kolaboratif untuk mengekspos pelanggaran HAM diseluruh dunia. Diketahui bahwa HRW adalah satu dari enam organisasi internasional yang membentuk koalisi untuk menghentikan “Penggunaan Prajurit Anak” pada tahun 1998. Selain itu berkampanye untuk “Melarang Ranjau Darat”, dan berkoalisi dengan kelompok masyarakat sipil global untuk mengenalkan Konvensi Ottawa yang merupakan sebuah perjanjian yang melarang penggunaan ranjau darat anti-personil. HRW menjadi anggota *International Freedom of Expression Exchange*, yaitu jaringan organisasi internasional yang memantau penyensoran diseluruh dunia (Columbia University).

Dalam melakukan penelitian, HRW tidak hanya berfokus pada persoalan korban dan pelaku, namun juga menentukan siapa yang dapat dan harus bertanggung jawab untuk menghentikan pelanggaran hak dan memberikan perubahan, langkah-langkah rinci dan spesifik yang mereka butuhkan untuk diambil, dan siapa saja yang bisa membawa pengaruh.

Terkait dengan bagaimana HRW dalam melakukan investigasi yaitu terdapat berbagai cara penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Penelitian Awal

Tujuan dari tahap awal penelitian adalah untuk mengembangkan pemahaman secara menyeluruh mengenai terjadinya suatu peristiwa pelanggaran atau pelanggaran terhadap hak dan untuk mendapatkan rasa kuat dari konteks politik, sosial, dan budaya lokal dari pelanggaran tersebut. Peneliti juga harus menyusun pelanggaran yang berkaitan dengan hukum HAM dan kemanusiaan internasional. Kontekstualisasi pelanggaran atau situasi membantu peneliti dalam tahap penelitian awal lainnya yaitu dalam hal mengidentifikasi calon korban dan saksi dalam kesaksian, menjangkau semua aktor yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, dan mulai mengidentifikasi target advokasi. Komunikasi dengan jaringan masyarakat lokal dan aktor yang relevan merupakan metode utama bagi peneliti untuk menempatkan diri dengan kondisi setempat dan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang situasinya.

Selain komunikasi pendahuluan melalui kontak, peneliti akan melakukan penelitian latar belakang yang ekstensif sebelum memulai wawancara dengan saksi atau korban. Para peneliti akan memeriksa melalui pandangan hukum yaitu baik hukum humaniter internasional, hukum HAM internasional, hukum domestik atau lokal, data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya, studi akademis atau kebijakan, laporan organisasi nonpemerintah, serta berita media yang relevan untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu kasus.

2. Penelitian melalui Wawancara: Lokasi

Tujuan HRW dengan misi penelitian ini adalah untuk mendapatkan cukup informasi tentang suatu kejadian, atau tentang pelanggaran hak yang terjadi secara berulang, dan untuk menciptakan gambaran yang akurat tentang apa yang terjadi. Penelitian ini tidak hanya membutuhkan wawancara korban tetapi juga mencoba untuk mendapatkan sisi lain dari informasi yang dibutuhkan dari peristiwa yang diteliti.

Untuk melakukan penelitian wawancara, para periset mencoba untuk mencapai lokasi spesifik yang diketahui telah terjadi atau sedang berlangsungnya pelanggaran itu. Kondisi keamanan dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi dimana peneliti melakukan investigasi. Dalam melakukan penelitian ini, HRW bekerjasama dengan mitra lokal, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membantu melakukan wawancara dengan korban dan saksi ditempat kejadian.

3. Penelitian Non Wawancara

Wawancara bukan satu-satunya bentuk bukti yang digunakan HRW selama penelitian dan pelaporan. Penelitian lainnya yaitu melakukan tinjauan ekstensif terhadap laporan media, peraturan perundang-undangan domestik, hukum internasional, dokumen kebijakan, laporan akademis, dan laporan masyarakat sipil selama tahap awal, dan sepanjang proses penelitian. Bahan uji coba laporan pemerintah, hukuman dan

materi hukuman sering digunakan untuk pembuatan laporan tentang kasus di HRW. Data yang dikumpulkan dari sumber seperti PBB, badan antar pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah dalam negeri juga sering dianalisis untuk membuktikan adanya dan luasnya pelanggaran HAM.

Di lapangan, peneliti terkadang mengumpulkan informasi dan data yang tidak berdasarkan wawancara tapi pada pemeriksaan lokasi kejadian. HRW telah menggunakan alat forensik untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM. HRW juga menggunakan koordinat GPS dan citra satelit untuk secara visual mengekspos lokasi terjadinya pelanggaran HAM. Ketika mendokumentasikan bukti pelanggaran HAM, peneliti dilatih untuk menggunakan metode yang mereka inginkan dan tidak hanya mengandalkan wawancara.

4. Penelitian Masyarakat Tertutup

HRW melakukan penelitian di banyak negara dan wilayah yang dapat didefinisikan sebagai "masyarakat tertutup" seperti Iran dan Korea Utara. Terdapat "daerah tertutup" lainnya yang mungkin berada di negara-negara yang secara teknis "terbuka" namun daerahnya tertutup bagi para peneliti karena ketidakamanan atau pembatasan yang diberlakukan oleh pihak berwenang. Ada banyak metode yang digunakan periset HRW untuk mengumpulkan informasi dari daerah tertutup yaitu; wawancara yang dilakukan melalui telepon dan melalui komunikasi online. Wawancara yang dilakukan tersebut digunakan untuk mengumpulkan informasi latar belakang dan mengidentifikasi

adanya pelanggaran hak (Human Rights Watch, 2017).

Selain itu, penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara di perbatasan yang terjadi di seluruh perbatasan negara bagian atau regional dengan saksi yang baru tiba dari wilayah tertutup. Hal ini merupakan metode lain yang digunakan untuk mewawancarai korban dan saksi pelanggaran hak. HRW juga mulai menggunakan teknologi satelit untuk mengekspos pelanggaran hak di wilayah tertutup. Citra satelit sangat efektif untuk menunjukkan efek sebelum dan sesudah konflik besar, seperti penghancuran desa, atau pergerakan massa, seperti pemindahan pengungsi. Citra satelit digunakan ketika HRW menerima laporan tentang lokasi tertentu yang diserang namun tidak memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah tersebut untuk mengkonfirmasi laporan.

C. HRW sebagai *International Human Rights Movement*

Menurut Aryeh Neier dalam bukunya yang berjudul “*The International Human Rights Movement: A History*”, *International human rights movement* adalah gerakan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang saling mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran HAM, pengacara, pihak lain yang menganjurkan adanya perlindungan hak, petugas medis khusus dalam merawat korban pelanggaran hak, dan orang-orang yang mendukung HAM secara finansial. Pergerakan HAM internasional tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan informasi terkait HAM, menulis surat, demonstrasi, membentuk, bergabung, dan mengelola suatu organisasi HAM. Pergerakan tersebut terjadi karena adanya persatuan komitmen yang fundamental untuk

mempromosikan HAM bagi semua orang di manapun berada (Neier, 2012).

HRW dengan misinya menegakkan HAM diseluruh dunia merupakan suatu pergerakan HAM internasional dengan dibuktikan dengan tiga alasan utama yang dijelaskan oleh Neier yaitu: pertama, asosiasi yang berkampanye untuk mengakhiri pelanggaran HAM di negara-negara yang represif. Tindakan kampanye dapat mempermalukan suatu pemerintahan karena menimbulkan perhatian publik terhadap persoalan pelanggaran yang diperjuangkan dan oleh karena itu, mereka sendiri sangat rentan terhadap pembalasan. Ketika pemantau HAM di satu bagian dunia diserang, organisasi yang beroperasi secara global dari tempat yang relatif aman akan membuat sebuah protes atas nama mereka. Dengan cara tersebut, gerakan global dapat memberikan ukuran perlindungan bagi kelompok nasional dan lokal.

Kedua, kondisi dalam suatu pemerintahan yang represif, yaitu pemerintahan yang mengabaikan pengaduan dari pemantau hak-hak domestik. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya kebebasan pers di negara tertentu untuk melaporkan keluhan mereka, atau media utama di negara tersebut harus sesuai dengan laporan pemerintah atau media itu dikendalikan oleh pemerintah sehingga banyak laporan pelanggaran terhadap hak kurang diperhatikan.. Selain itu, seringkali sulit bagi pers internasional untuk menilai kebenaran dari keluhan yang dikeluarkan dari organisasi lokal karena secara teratur diberhentikan oleh pemerintah mereka sebagai upaya politis oleh kelompok oposisi dengan mengatasnamakan HAM untuk mendiskreditkan pemerintah dengan tuduhan yang tidak benar.

Organisasi global terkemuka disisi lain memiliki reputasi yang mereka miliki melalui pekerjaan mereka di banyak negara seperti yang HRW lakukan dengan kemampuan jaringannya di lebih 90 negara dengan 400 staf dari berbagai latar belakang dan kebangsaan. Ketiga, organisasi yang beroperasi secara global memiliki akses yang siap ke berbagai forum internasional dan kontak yang mapan di media

internasional. HRW memiliki jaringan kontak dengan berbagai kalangan yang terkait seperti LSM lokal, akademisi, dan media. Oleh karena itu, jauh lebih sulit bagi pemerintah untuk mengabaikan badan HAM global yang berbasis jauh daripada organisasi nasional di negaranya sendiri.

Melihat penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa HRW merupakan suatu *international human right movement* karena sifat gerakannya yang mengglobal dan memiliki jaringan internasional sebagai alat advokasi. Terlebih, HRW adalah organisasi yang memiliki pengaruh terhadap perubahan suatu kebijakan dan mampu menyebarkan gagasan mengenai HAM diseluruh dunia. Sehingga, HRW dapat menjalankan perannya sebagai *international human right movement* melalui sistem kerja yang diterapkan oleh HRW itu sendiri. Dengan bantuan staff dari berbagai kebangsaan dan profesi serta melakukan investigasi mengglobal, maka HRW menjadi pergerakan internasional yang terpercaya dapat melakukan perlindungan dan perubahan terkait HAM diseluruh dunia.